EVALUASI FAKTOR PENUNJANG PERMUKIMAN BERKELANJUTAN DI TSM TELANG, BANYUASIN

Nyiluh Rahajeng Sofia Undari¹, Rahmatyas Aditantri²

^{1,2} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Perencanaan dan Desain Berkelanjutan, Universitas Agung Podomoro, Jakarta

² Urban and Regional Planning Department, International Islamic University Malaysia

Surel: ¹ nyiluhundari@gmail.com; ² r.aditantri@live.iium.edu.my

Vitruvian Vol 15 No 2 Juli 2025

Diterima: 11 06 2025 | Direvisi: 14 07 2025 | Disetujui: 18 07 2025 | Diterbitkan: 25 07 2025

ABSTRAK

Permukiman Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Telang, Banyuasin menghadapi tantangan kompleks dalam upaya mencapai keberlanjutan kawasan. Kerentanan terhadap bencana, keterbatasan infrastruktur dasar, serta degradasi kualitas lingkungan menjadi isu utama yang belum tertangani secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penunjang keberlanjutan permukiman berbasis konteks lokal. Menggunakan pendekatan *mix-method*, data dikumpulkan melalui survei terhadap 100 kepala keluarga, wawancara mendalam dengan lima pakar, serta studi literatur kebijakan dan regulasi. Analisis dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menetapkan bobot prioritas masing-masing faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dasar, keterlibatan sosial masyarakat, dan kualitas lingkungan merupakan tiga faktor dominan yang paling menentukan keberlanjutan permukiman. Temuan juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dan preferensi penghuni, terutama dalam hal sanitasi dan akses air bersih. Kajian ini menegaskan pentingnya perencanaan adaptif yang berpijak pada partisipasi komunitas serta sinergi antara aspek teknis dan sosial dalam merancang permukiman berkelanjutan. Implikasi penelitian ini tidak hanya relevan bagi TSM Telang, tetapi juga dapat diadopsi pada kawasan transmigrasi lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: Keberlanjutan permukiman; infrastruktur dasar; AHP; partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The Transmigration Swakarsa Mandiri (TSM) settlement in Telang, Banyuasin faces multifaceted challenges in achieving sustainable development. Disaster vulnerability, limited basic infrastructure, and environmental degradation remain persistent issues. This study aims to identify and evaluate the key enabling factors of settlement sustainability within a localized framework. Employing a mixed-methods approach, data were obtained through surveys of 100 households, in-depth interviews with five experts, and review of policy documents. Analytical Hierarchy Process (AHP) was utilized to prioritize contributing factors. Findings reveal that basic infrastructure, community engagement, and environmental quality are the three most critical determinants of sustainability. The study also uncovers a notable gap between existing conditions and residents' expectations, particularly in access to clean water and sanitation. The research underscores the necessity of adaptive planning grounded in community participation and the integration of technical and social dimensions. These insights not only inform development strategies in TSM Telang but also offer transferable lessons for sustainable settlement planning in other transmigration areas across Indonesia.

Keywords: Settlement sustainability; basic infrastructure; AHP; community engagement

PENDAHULUAN

Pembangunan permukiman berkelanjutan telah menjadi prioritas dalam agenda nasional Indonesia, khususnya dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan mencakup perhatian terhadap keadilan sosial antar generasi, standar hidup global yang dasar, dan mengurangi tingkat konsumsi sumber daya tak terbarukan (Aditantri, 2016). Prinsip ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menekan dampak terhadap lingkungan serta meningkatkan keuntungan bagi masyarakat (Bringezu, Ramaswami, Brien, & Fry, 2017). Permukiman berkelanjutan dari aspek lingkungan meliputi pengelolaan sumber daya alam secara bijak, pengurangan dampak lingkungan, serta adaptasi terhadap perubahan iklim melalui desain infrastruktur ramah lingkungan seperti drainase yang baik dan pemanfaatan energi terbarukan untuk menekan emisi karbon dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana (Wheatley, 2024). Dari aspek sosial, permukiman berkelanjutan menitikberatkan pada pembentukan komunitas yang inklusif dan terpadu melalui penyediaan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan ruang publik yang mendorong interaksi dan keterpaduan sosial (Tzoulas, K., Korpela, K., & Venn, 2019). Sedangkan Secara dari aspek ekonomi, permukiman berkelanjutan bertujuan menciptakan peluang ekonomi yang stabil melalui pengembangan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah guna mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal (Elmqvist, T., Frantzeskaki, N., & Eriksson, 2019).

Salah satu instrumen strategis dalam kebijakan tersebut adalah program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) yang mendorong masyarakat untuk membentuk permukiman secara mandiri di wilayah baru. Namun, realisasi program ini sering kali menghadapi tantangan kompleks, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dasar, kerentanan terhadap bencana, serta kesiapan sosial dan ekonomi yang belum optimal (Suwandi, Kristiana, & Madya, 2022). Kawasan TSM Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan contoh nyata dari tantangan tersebut. Kawasan ini mengalami bencana banjir besar pada awal tahun 2024 yang menyebabkan kerusakan signifikan

terhadap rumah, fasilitas umum, serta jaringan infrastruktur dasar. Selain itu, masyarakat di kawasan ini menghadapi krisis air bersih, rendahnya akses terhadap layanan sanitasi yang layak, serta kurangnya dukungan terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan.

Problematisa yang dihadapi dalam pengembangan permukiman transmigrasi salah satunya adalah strategi komunikasi dan penyebaran informasi transmigrasi yang cenderung kurang memperhatikan kesiapan sosial dan budaya masyarakat calon transmigran, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan integrasi mereka di kawasan baru (Putra, 2019). Pentingnya pemenuhan prinsip 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan) sejak tahap awal perencanaan permukiman transmigrasi agar dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (DAIM, 2021). Penelitian lainnya juga menyoroti bahwa keberhasilan permukiman transmigrasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan berbasis lokal dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik sosial serta ekologis kawasan binaan (Wesnawa, 2020).

Implementasi pola pugar dalam pembangunan permukiman perlu memperhatikan kondisi eksisting dan kapasitas adaptif masyarakat setempat (Suwandi et al., 2022). Di sisi lain, keberhasilan pembangunan kawasan permukiman sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya lokal, serta keberlanjutan ekologi lingkungan binaan (Mario, Keraf, Haryono, & Wanusmawatie, 2020).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memusatkan pada evaluasi faktor-faktor yang menunjang keberlanjutan permukiman di TSM Telang yang diawali dengan mengidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor penunjangnya. Pendekatan yang digunakan adalah menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif melalui teknik Analytical Hierarchy Process (AHP), yang memungkinkan pengukuran bobot prioritas masing-masing faktor berdasarkan pandangan pakar dan preferensi masyarakat. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang dikaji mencakup aspek infrastruktur dasar, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara kondisi eksisting dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi, merupakan titik lemah yang harus

segera diintervensi. Penjelasan mengenai ketidakselarasan antara kondisi eksisting dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil identifikasi awal dan observasi lapangan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan. Pernyataan ini merujuk pada temuan survei dan wawancara yang menunjukkan bahwa aspek air bersih dan sanitasi memiliki tingkat ketercapaian yang rendah berdasarkan preferensi penghuni.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara *bottom-up* dan *top-down* dalam menganalisis keberlanjutan permukiman. Tidak banyak studi sebelumnya yang secara simultan memadukan analisis persepsi masyarakat dengan penilaian pakar dalam konteks transmigrasi swakarsa. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode AHP untuk mengukur hierarki prioritas faktor keberlanjutan secara sistematis, yang belum umum diterapkan dalam studi sejenis (Saaty, 2008). Dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan kontekstual, studi ini tidak hanya relevan bagi TSM Telang, tetapi juga dapat menjadi model replikasi dalam perencanaan kawasan transmigrasi lain di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan praktik perencanaan permukiman dengan pendekatan yang lebih holistik, adaptif, dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan permukiman berkelanjutan di kawasan TSM Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih untuk menggabungkan kekuatan data numerik dari masyarakat dan pemahaman kontekstual dari para ahli dalam menyusun evaluasi komprehensif (Maheshwari, Grigolon, & Brussel, 2022). Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Muara Telang, wilayah dataran rendah yang dikelilingi lahan rawa dan pasang surut, menjadikan kawasan ini rawan terhadap banjir dan memerlukan strategi perencanaan adaptif. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, kuesioner kepada kepala keluarga, dan wawancara mendalam terhadap lima narasumber ahli. Teknik

observasi digunakan untuk mendokumentasikan kondisi fisik, sosial, dan kualitas lingkungan permukiman secara langsung. Sementara itu, kuesioner disebarikan kepada 100 kepala keluarga sebagai sampel representatif dari total 600 kepala keluarga di kawasan tersebut. Instrumen kuesioner mengukur persepsi masyarakat terhadap aspek infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan skala Likert 1–5. Wawancara mendalam dilakukan dengan empat narasumber kunci yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuasin; BAPPEDA Banyuasin, Direktorat Perumahan Kementerian PUPR; konsultan ahli berpengalaman dalam pengembangan permukiman berbasis komunitas, khususnya dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual; dan pakar *Sustainable Development Goals*. Kelima narasumber ini memberikan perspektif saling melengkapi mengenai kondisi aktual di lapangan, tantangan implementasi kebijakan, serta rekomendasi strategis dalam perencanaan permukiman berkelanjutan.

Evaluasi ketercapaian dilakukan untuk menilai sejauh mana kondisi eksisting di TSM Telang memenuhi indikator keberlanjutan yang telah dirumuskan melalui hasil AHP. Penggunaan metode AHP menghasilkan bobot prioritas yang objektif, terukur dan memberikan struktur pengambilan keputusan yang sistematis (Aurachman, 2019) dengan hasil evaluasi sosial-ekonomi. Survei kuantitatif digunakan untuk menjangkau persepsi penghuni terhadap 18 indikator yang dibagi ke dalam empat dimensi: (1) keberlanjutan ekonomi, (2) infrastruktur dasar, (3) ketersediaan lahan, dan (4) keterlibatan sosial, melalui survei terhadap 100 responden yang merupakan penghuni kawasan transmigrasi. Instrumen disusun dalam format skala Likert 1–5, di mana skor 1 berarti “sangat tidak memadai” dan skor 5 berarti “sangat memadai”. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah menjumlahkan skor dari seluruh responden untuk masing-masing indikator. Skor total kemudian dikalikan dengan bobot prioritas hasil AHP untuk menghasilkan nilai akhir ketercapaian seperti dilihat pada persamaan (1).

$$\text{Nilai Akhir} = \text{Skor Total} \times \text{Bobot} \quad (1)$$

Nilai akhir dari masing-masing indikator kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kelas interval, untuk mengelompokkan

tingkat ketercapaian secara terstruktur. Pengelompokan ini memungkinkan perbandingan antar faktor serta identifikasi aspek mana yang telah memenuhi ekspektasi penghuni dan mana yang memerlukan intervensi perencanaan.

Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sumber: Penulis, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Permukiman Berkelanjutan

Proses identifikasi faktor dilakukan melalui pendekatan AHP dengan melibatkan empat pakar dari institusi yang relevan. Setiap pakar memberikan penilaian terhadap lima kriteria utama, yaitu keberlanjutan ekonomi, infrastruktur dasar, ketersediaan lahan, keberlanjutan sosial, dan kualitas lingkungan serta sejumlah subkriteria yang mewakili masing-masing aspek.

Pakar 1

Pakar 1 yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil analisis kriteria menggunakan software Expert Choice 11, diperoleh peringkat 1 untuk faktor yang mempengaruhi permukiman berkelanjutan adalah aspek keberlanjutan ekonomi dengan bobot 0,473. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Analisis Pakar 1
Sumber: Penulis, 2024

Pakar 2

Pakar 2 yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi II Kalimantan Selatan. Berdasarkan analisis kriteria yang dilakukan menggunakan software Expert Choice 11, diperoleh peringkat 1 untuk kriteria faktor yang mempengaruhi permukiman berkelanjutan adalah aspek keberlanjutan ekonomi dengan nilai bobot 0,551. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Hasil Analisis Pakar 2
Sumber: Penulis, 2024

Pakar 3

Pakar 3 yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan analisis kriteria yang dilakukan menggunakan software Expert Choice 11, diperoleh peringkat 1 untuk kriteria faktor yang mempengaruhi permukiman berkelanjutan adalah aspek keberlanjutan ekonomi dengan nilai bobot 0,608. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Analisis Pakar 3
Sumber: Penulis, 2024

Pakar 4

Pakar 4 yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional. Berdasarkan analisis kriteria yang dilakukan menggunakan software Expert Choice 11, diperoleh peringkat 1 untuk kriteria faktor yang mempengaruhi permukiman berkelanjutan adalah aspek keberlanjutan ekonomi dengan nilai bobot 0,273. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Hasil Analisis Pakar 4
Sumber: Penulis, 2024

Pakar 5

Pakar 5 yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Pakar *Sustainable Development Goals*. Berdasarkan analisis kriteria yang dilakukan menggunakan software Expert Choice 11, diperoleh peringkat 1 untuk kriteria faktor yang mempengaruhi permukiman berkelanjutan adalah aspek infrastruktur dasar dengan nilai bobot 0,375. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Analisis Pakar 5
Sumber: Penulis, 2024

Combined

Dari hasil penggabungan (*combined*) kelima pakar, diperoleh bahwa keberlanjutan ekonomi (0,472) dan infrastruktur dasar (0,278) merupakan dua faktor yang paling signifikan dalam perencanaan permukiman berkelanjutan di TSM Telang. Faktor lainnya adalah ketersediaan lahan (0,140), keberlanjutan sosial (0,081), dan kualitas lingkungan (0,029). Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan keberlanjutan di kawasan transmigrasi harus berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, pemenuhan infrastruktur dasar yang layak, serta kepastian hukum atas lahan yang dimiliki masyarakat. Hasil faktor prioritas keberlanjutan permukiman di TSM Telang dapat dilihat pada Gambar 7.

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan keberlanjutan di kawasan transmigrasi harus berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, pemenuhan infrastruktur dasar yang layak, serta kepastian hukum atas lahan yang dimiliki masyarakat.

Gambar 7. Faktor Prioritas Permukiman Berkelanjutan
Sumber: Penulis, 2024

Evaluasi Ketercapaian Faktor Menurut Prefrensi Penghuni

Evaluasi ketercapaian faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan permukiman berkelanjutan di TSM Telang, Banyuasin dilakukan melalui survei terhadap penghuni transmigrasi menggunakan metode skala Likert 1–5. Setiap indikator dievaluasi berdasarkan persepsi penghuni mengenai seberapa baik indikator tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian dilakukan dengan kriteria kualitas lingkungan, ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial, berdasarkan hasil identifikasi kriteria pada faktor yang telah teridentifikasi.

Keberlanjutan Ekonomi

Evaluasi ketercapaian faktor keberlanjutan ekonomi memiliki bobot 0,257 terdiri atas lima subfaktor. Bobot ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan permukiman di TSM Telang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja memperoleh skor rata-rata sebesar 3,8 dengan nilai akhir 3,77, dan tingkat pendapatan memiliki skor

3,1 dengan nilai akhir 3,89. Kedua subfaktor tersebut masuk dalam kategori cukup memadai (kelas 3). Namun demikian, subfaktor dukungan terhadap usaha lokal (1,88), diversifikasi penghasilan (1,25), dan konektivitas ekonomi (1,84) berada dalam kategori sangat tidak memadai (kelas 1). Temuan ini mencerminkan lemahnya struktur ekonomi lokal dan kebutuhan untuk memperkuat sektor usaha serta memperluas akses pasar bagi masyarakat.

Infrastruktur Dasar

Evaluasi ketercapaian faktor infrastruktur dasar memiliki bobot 0,255 terdiri atas empat subfaktor. Bobot ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan permukiman di TSM Telang, Banyuasin. Hasil evaluasi menunjukkan aspek ketersediaan air bersih memperoleh skor 3,2 dan nilai akhir 3,81 (kelas 3), sedangkan ketersediaan listrik mendapatkan skor 4,5 dan nilai akhir 4,14 (kelas 4), yang mengindikasikan kondisi yang cukup hingga memadai. Sebaliknya, aspek sanitasi dengan skor 1,5 dan nilai akhir 1,38 serta jaringan drainase dengan skor 2,8 dan nilai akhir 1,26 berada dalam kategori sangat tidak memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sanitasi dan pengelolaan drainase merupakan tantangan utama yang harus segera diatasi guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan mencegah dampak buruk dari genangan serta bencana banjir.

Ketersediaan Lahan

Evaluasi ketercapaian faktor ketersediaan lahan memiliki bobot 0,217 terdiri atas dua subfaktor. Bobot ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan memiliki peran cukup penting dalam menunjang keberlanjutan permukiman di TSM Telang, Banyuasin. Hasil evaluasi menunjukkan kepemilikan sah atas tanah memperoleh skor 4,5 dan nilai akhir 4,14, sementara kesesuaian lahan pertanian mendapatkan skor 4,3 dan nilai akhir 4,90. Kedua subfaktor ini termasuk dalam kategori memadai (kelas 4) dan menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan.

Kualitas Lingkungan

Evaluasi ketercapaian faktor kualitas lingkungan memiliki bobot 0,158 terdiri dari tiga subfaktor. Bobot ini menunjukkan bahwa

kualitas lingkungan memiliki peran cukup penting dalam menunjang keberlanjutan permukiman di TSM Telang, Banyuasin. Hasil evaluasi menunjukkan kualitas udara memperoleh skor tinggi sebesar 4,6 dan nilai akhir 4,69 (kelas 4), mencerminkan kondisi lingkungan yang sehat dan relatif bebas dari polusi. Namun, kualitas air hanya memperoleh skor 2,6 dengan nilai akhir 2,39 (kelas 2), sementara pengelolaan limbah rumah tangga memperoleh skor 1,6 dan nilai akhir 1,24 (kelas 1). Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi dalam peningkatan akses terhadap air bersih dan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi.

Keterlibatan Sosial

Evaluasi ketercapaian faktor keterlibatan sosial memiliki bobot 0,200 terdiri dari tiga subfaktor, ini diperoleh melalui penilaian pakar, yang menganggap bahwa Keterlibatan sosial yang baik dapat meningkatkan kohesi sosial dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Hasil evaluasi menunjukkan integrasi sosial memperoleh skor 4,0, yang seharusnya menunjukkan kategori memadai (kelas 4), meskipun nilai akhirnya rendah akibat perhitungan bobot. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan memperoleh nilai akhir 1,70 (kelas 3), sementara pengelolaan konflik sosial mendapat nilai tinggi sebesar 4,90 (kelas 4). Secara umum, keterlibatan sosial di TSM Telang dinilai cukup baik, namun tetap perlu diperkuat dalam aspek partisipasi aktif masyarakat terhadap pengambilan keputusan pembangunan.

Kesimpulan Evaluasi Ketercapaian

Faktor keberlanjutan ekonomi memperoleh bobot prioritas tertinggi dari analisis AHP gabungan, hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan ekonomi dalam mendukung revitalisasi kawasan permukiman (Lee & Lim, 2018). Namun demikian, hasil evaluasi berdasarkan persepsi penghuni menunjukkan bahwa aspek seperti dukungan terhadap usaha lokal, diversifikasi penghasilan, dan konektivitas ekonomi masih tergolong sangat tidak memadai, mencerminkan lemahnya struktur ekonomi lokal. Di sisi lain, aspek infrastruktur dasar seperti ketersediaan air bersih dan listrik tergolong cukup hingga memadai, namun kualitas sanitasi dan sistem drainase masih jauh dari memadai dan perlu perhatian segera. Aspek ketersediaan lahan menunjukkan performa yang baik, khususnya dalam kepemilikan sah atas lahan

dan kesesuaian untuk pertanian, sehingga menjadi salah satu kekuatan utama kawasan. Sementara itu, kualitas lingkungan menunjukkan hasil yang beragam, dengan kualitas udara tergolong baik, tetapi kualitas air dan pengelolaan limbah masih menjadi kendala utama. Terakhir, keterlibatan sosial menunjukkan potensi positif dalam hal integrasi sosial dan pengelolaan konflik, meskipun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan permukiman perlu lebih dioptimalkan. Rendahnya nilai ketercapaian pada aspek-aspek ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kondisi eksisting dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas hidup yang berkelanjutan (Report, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor-faktor yang menunjang keberlanjutan permukiman pada kawasan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Telang di Kabupaten Banyuwangi. Dengan pendekatan mixed methods dan pemanfaatan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menggabungkan pandangan lima pakar dengan preferensi penghuni guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait keberlanjutan permukiman. Hasil temuan menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi keberlanjutan permukiman, yaitu keberlanjutan ekonomi, infrastruktur dasar, ketersediaan lahan, kualitas lingkungan, dan keterlibatan sosial.

Kesimpulan dari evaluasi ketercapaian faktor perencanaan permukiman berkelanjutan di TSM Telang, Banyuwangi bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang sudah memadai serta aspek-aspek yang perlu ditingkatkan berdasarkan preferensi penghuni. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan utama kawasan TSM Telang terletak pada aspek ketersediaan lahan dan keterlibatan sosial, yang telah memenuhi sebagian besar ekspektasi penghuni. Di sisi lain, aspek yang memerlukan perhatian khusus mencakup infrastruktur dasar, khususnya sanitasi dan sistem drainase; penguatan ekonomi lokal, terutama dalam hal diversifikasi pendapatan dan dukungan usaha kecil; serta pengelolaan lingkungan, terutama terkait pengolahan limbah dan kualitas air bersih. Oleh karena

itu, strategi perencanaan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan aspek-aspek tersebut secara terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan, agar tujuan pembangunan permukiman yang inklusif dan adaptif dapat tercapai secara menyeluruh.

Saran/Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar strategi pembangunan permukiman di kawasan TSM Telang, serta wilayah transmigrasi lainnya, diarahkan pada penguatan sektor ekonomi lokal melalui pembukaan akses terhadap pasar, pendampingan usaha kecil, dan program diversifikasi penghasilan. Selain itu, perbaikan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan drainase harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan lingkungan (Kalsum & Caesariadi, 2016).

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang telah diuraikan, disarankan agar penelitian di masa mendatang mencakup wilayah transmigrasi lain sebagai studi pembandingan guna memperluas generalisasi temuan dan memperkaya basis data perencanaan kawasan. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk menggunakan pendekatan geospasial yang mampu memetakan hubungan antara faktor sosial-ekonomi dan karakteristik fisik lingkungan, seperti topografi, sistem drainase alami, serta sebaran permukiman. Selain itu, diperlukan pelibatan lebih luas dari pemangku kepentingan lintas sektor, seperti instansi pemerintah, akademisi, serta komunitas lokal, guna memahami lebih dalam dinamika perencanaan dan implementasi pembangunan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mendalami keterkaitan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan keberhasilan pembangunan permukiman, terutama dalam konteks adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, agar pembangunan permukiman tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan aspirasi komunitas lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditantri, R. (2016). Sustainable Home Based Enterprise: Criteria toward the Concept Case Study: Kampung Sate, Ponorogo, Indonesia. *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*, 5(2), 67–74.

- Aurachman, R. (2019). PROSES PENGAMBILAN DATA PADA AHP (ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) MENGGUNAKAN PRINSIP CLOSED LOOP CONTROL SYSTEM. *JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI VOLUME*, 6. <https://doi.org/10.24853/jisi.6.1.55-64>
- Bringezu, S., Ramaswami, A., Brien, M. O., & Fry, J. (2017). *A systems approach to resource* (Vol. 55126).
- DAIM, C. (2021). Evaluasi Pembangunan Permukiman Transmigrasi (KimTrans) dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Repository.Pertanian.Go.Id*, 2(2), 2020–2024. Retrieved from [http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/13147%0Ahttp://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/13147/Evaluasi Pembangunan Permukiman Transmigrasi %20KIMTRANS%29 dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/13147%0Ahttp://repository.pertanian.go.id/bitstream/handle/123456789/13147/Evaluasi%20Pembangunan%20Permukiman%20Transmigrasi%20dalam%20mewujudkan%20Pembangunan%20Berkelanjutan.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Elmqvist, T., Frantzeskaki, N., & Eriksson, H. (2019). Sustainability and resilience in urban ecosystems. *Urban Ecosystems. Urban Transformations*, 22(2). <https://doi.org/10.1186/s42854-021-00019-z>
- Kalsum, E., & Caesariadi, T. W. (2016). Konsep Permukiman Kota Terpadu Mandiri. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 3(2), 12–24. <https://doi.org/10.26418/lantang.v3i2.18322>
- Lee, J. H., & Lim, S. (2018). An analytic Hierarchy Process (AHP) approach for sustainable assessment of economy-based and community-based urban regeneration: The case of South Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 10(12). <https://doi.org/10.3390/su10124456>
- Maheshwari, R., Grigolon, A., & Brussel, M. (2022). Case Studies on Transport Policy Evaluating TOD in the context of local area planning using mixed-methods. *Case Studies on Transport Policy*, 10(2), 1015–1025. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2022.03.013>
- Mario, M., Keraf, B., Haryono, B. S., & Wanusmawatie, I. (2020). *Pembangunan Desa (Studi di Kecamatan Alok Kabupaten Sikka)*. 5(7), 435–441.
- Putra, P. (2019). Strategi dan Bentuk-bentuk Informasi Transmigrasi pada Masa Orde Baru dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 35(2), 1–15. Retrieved from <http://repository.lppm.unila.ac.id/20237>
- Report, W. C. (2020). *Unpacking the Value of Sustainable Urbanization*. <https://doi.org/10.18356/c41ab67e-en>
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the Analytic Hierarchy Process. *Scientia Iranica*, 9(3), 215–229. <https://doi.org/10.1504/ijssci.2008.017590>
- Suwandi, S., Kristiana, T., & Madya, F. (2022). Implementasi Program Permukiman Transmigrasi Pola Restorasi di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(2), 110–119. <https://doi.org/10.33830/humayafhisip.v2i2.2183>
- Tzoulas, K., Korpela, K., & Venn, S. (2019). A review of the literature. *Urban Forestry & Urban Greening. Urban Forestry and Urban Greening*, 37, 201–214. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.10.010>
- Wesnawa, I. G. A. (2015). Geografi Permukiman. *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 98.
- Wheatley, M. C., & Wheatley, M. C. (n.d.). *PREMIER JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE Sustainable Cities : Urban Planning for the Future*.